

Theory of Change (ToC) Bidang Kesejahteraan Sosial

1. Permasalahan Utama (Problem Statement)

Permasalahan utama pada bidang kesejahteraan sosial adalah masih tingginya **kerentanan sosial masyarakat miskin** akibat keterbatasan akses terhadap **program perlindungan sosial yang terpadu**, belum optimalnya **ketepatan sasaran bantuan sosial**, rendahnya **kapasitas keluarga miskin** dalam menghadapi **guncangan ekonomi**, terbatasnya **pemberdayaan kelompok rentan**, serta belum kuatnya **koordinasi antarprogram kesejahteraan sosial** sehingga menyebabkan masyarakat tetap berada dalam kondisi rentan dan berisiko mengalami **kemiskinan berulang**.



Akses Perlindungan Sosial Terbatas



Bantuan Sosial Belum Tepat Sasaran



Kapasitas Keluarga Miskin Rendah



Pemberdayaan Kelompok Rentan Terbatas

“ Perlindungan Sosial yang Tepat Sasaran adalah Fondasi Kemandirian, Kemandirian adalah Jalan Menuju Kesejahteraan ”

2. Akar Permasalahan (Root Causes)

Analisis menunjukkan bahwa rendahnya kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut.

1. Tingginya jumlah rumah tangga rentan miskin.
2. Belum optimalnya integrasi data kemiskinan dan perlindungan sosial.
3. Ketepatan sasaran bantuan sosial yang masih perlu ditingkatkan.
4. Ketergantungan sebagian penerima terhadap bantuan sosial konsumtif.
5. Rendahnya kapasitas ekonomi keluarga miskin.
6. Terbatasnya pemberdayaan kelompok rentan.
7. Lemahnya koordinasi lintas sektor.
8. Rendahnya kapasitas kelembagaan sosial masyarakat.
9. Masih terbatasnya pelayanan rehabilitasi sosial.
10. Tingginya risiko bencana dan guncangan ekonomi.
11. Belum berkembangnya perlindungan sosial adaptif.
12. Terbatasnya akses penyandang disabilitas terhadap pelayanan sosial.

3. Input (Root Causes)

Untuk mengatasi berbagai akar permasalahan tersebut diperlukan dukungan sumber daya berupa:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. APBD Kabupaten. | 12. Program pemberdayaan masyarakat. |
| 2. APBN. | 13. Organisasi sosial. |
| 3. Dana Desa. | 14. Lembaga kesejahteraan sosial. |
| 4. Program Kementerian Sosial. | 15. Dunia usaha melalui CSR. |
| 5. Dinas Sosial. | 16. Perguruan tinggi. |
| 6. DTKS/DTSEN yang mutakhir. | 17. Tokoh agama dan tokoh masyarakat. |
| 7. Pendamping sosial. | 18. Sistem informasi kesejahteraan sosial. |
| 8. Pekerja sosial profesional. | 19. Relawan sosial. |
| 9. PKH. | 20. Tagana. |
| 10. BPNT. | 21. Forum CSR. |
| 11. Program rehabilitasi sosial. | |



4. Aktivitas Strategis (Root Causes)

Program prioritas diarahkan pada:

- | | |
|---|--|
| 1. Pemutakhiran data kemiskinan secara berkala. | 9. Pemberdayaan keluarga miskin. |
| 2. Integrasi seluruh program perlindungan sosial. | 10. Pelatihan ekonomi produktif bagi penerima bantuan. |
| 3. Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. | 11. Transformasi bantuan sosial menuju pemberdayaan. |
| 4. Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH). | 12. Penguatan kelembagaan sosial desa. |
| 5. Penguatan bantuan pangan. | 13. Pengembangan desa tangguh sosial. |
| 6. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. | 14. Penguatan kesiapsiagaan bencana sosial. |
| 7. Perlindungan lanjut usia. | 15. Penguatan koordinasi lintas OPD. |
| 8. Perlindungan anak terlantar. | 16. Penguatan sistem perlindungan sosial adaptif. |



5. Output (Root Causes)

Pelaksanaan aktivitas strategis tersebut diharapkan menghasilkan:

-  DTKS/DTSEN yang lebih akurat dan mutakhir.
-  Meningkatnya ketepatan sasaran bantuan sosial.
-  Bertambahnya keluarga miskin yang memperoleh perlindungan sosial.
-  Bertambahnya kelompok rentan yang memperoleh rehabilitasi sosial.
-  Bertambahnya penerima bantuan yang mengikuti pelatihan ekonomi produktif.
-  Bertambahnya desa dengan kelembagaan sosial aktif.
-  Meningkatnya koordinasi lintas sektor.
-  Meningkatnya kapasitas pendamping sosial.
-  Bertambahnya keluarga graduasi dari program bantuan sosial.



6. Outcome Jangka Menengah (Root Causes)

Perubahan yang diharapkan meliputi:

-  Menurunnya kerentanan sosial rumah tangga miskin.
-  Meningkatnya ketahanan ekonomi keluarga.
-  Menurunnya ketergantungan terhadap bantuan sosial.
-  Meningkatnya kemandirian ekonomi penerima bantuan.
-  Meningkatnya kualitas pelayanan sosial.
-  Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial.
-  Meningkatnya inklusi sosial kelompok rentan.
-  Menurunnya jumlah masyarakat miskin ekstrem.



7. Dampak (Impact) (Root Causes)

Dalam jangka panjang, perubahan tersebut diharapkan menghasilkan:



Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu secara berkelanjutan.



Terwujudnya sistem perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.



Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.



Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat.



Berkurangnya kesenjangan sosial.



Meningkatnya kualitas hidup kelompok rentan.



Terwujudnya pembangunan yang berkeadilan sosial.

c. Prioritas Program Bidang Kesejahteraan Sosial

Prioritas Program Bidang Kesejahteraan Sosial (Root Causes)

Prioritas Program	Tujuan
Pemutakhiran DTKS/DTSEN	Meningkatkan akurasi sasaran program kemiskinan
Penguatan bantuan sosial adaptif	Melindungi masyarakat dari guncangan sosial-ekonomi
Transformasi bantuan sosial produktif	Mendorong kemandirian ekonomi keluarga miskin
Pemberdayaan keluarga miskin	Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga
Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	Meningkatkan kualitas hidup dan inklusi sosial
Perlindungan lanjut usia	Menjamin kesejahteraan lansia terlanjar
Perlindungan anak dan kelompok rentan	Mengurangi kerentanan sosial antargenerasi
Penguatan kelembagaan sosial desa	Memperkuat partisipasi masyarakat dalam perlindungan sosial
Pengembangan desa tangguh sosial	Meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi bencana dan krisis
Penguatan koordinasi lintas sektor	Meningkatkan efektivitas program kesejahteraan sosial
Penguatan perlindungan sosial adaptif	Menjamin keberlanjutan perlindungan bagi masyarakat rentan

d. Kesimpulan

Hasil Analisis Prioritas Masalah menunjukkan bahwa **kesejahteraan sosial merupakan determinan penting dalam penanggulangan kemiskinan karena berfungsi sebagai sistem perlindungan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi yang dapat menyebabkan masyarakat jatuh atau kembali ke dalam kemiskinan**. Dengan demikian, kebijakan kesejahteraan sosial tidak dapat dipandang hanya sebagai mekanisme distribusi bantuan, tetapi sebagai investasi pembangunan yang memperkuat kapasitas masyarakat untuk bertahan, bangkit, dan berkembang.



Pemutakhiran DTKS/DTSN menjadi fondasi utama agar seluruh program perlindungan sosial berbasis pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang berkualitas memungkinkan pemerintah daerah menetapkan sasaran penerima manfaat secara lebih tepat, mengurangi kesalahan inklusi maupun eksklusi, serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Penguatan bantuan sosial adaptif dirancang untuk melindungi masyarakat dari berbagai guncangan, seperti bencana alam, kehilangan pekerjaan, krisis ekonomi, maupun keadaan darurat lainnya. Namun demikian, bantuan sosial perlu ditransformasikan secara bertahap menjadi **bantuan sosial produktif**, sehingga penerima manfaat memperoleh kesempatan meningkatkan kapasitas ekonomi melalui pelatihan keterampilan, penguatan kewirausahaan, akses pembiayaan, dan pendampingan usaha. Transformasi ini akan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dan mendorong graduasi mandiri dari program perlindungan sosial.

Pemberdayaan keluarga miskin diarahkan pada penguatan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat fungsi keluarga sebagai unit utama pembangunan sosial. Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, perlindungan lanjut usia, serta perlindungan anak merupakan bentuk intervensi yang memastikan kelompok rentan memperoleh kesempatan yang setara untuk hidup secara bermartabat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Penguatan kelembagaan sosial desa, pengembangan desa tangguh sosial, dan peningkatan kapasitas pendamping sosial memperkuat ketahanan sosial masyarakat sehingga mampu merespons berbagai tantangan secara cepat dan efektif. Di sisi lain, koordinasi lintas sektor memastikan bahwa seluruh program kesejahteraan sosial saling melengkapi dan mendukung pencapaian tujuan bersama dalam penanggulangan kemiskinan.

Theory of Change Bidang Kesejahteraan Sosial menunjukkan bahwa penyediaan sumber daya (input), pelaksanaan aktivitas strategis (activities), pencapaian keluaran (output), dan perubahan kondisi sosial-ekonomi keluarga (outcome) akan menghasilkan dampak jangka panjang berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat, berkurangnya kerentanan sosial, menguatnya ketahanan keluarga, serta menurunnya angka kemiskinan secara berkelanjutan. Keberhasilan intervensi bidang kesejahteraan sosial tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari meningkatnya kemandirian keluarga, berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan, serta tumbuhnya masyarakat yang mampu mengelola risiko secara mandiri. Dengan demikian, pembangunan kesejahteraan sosial harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan pemberdayaan masyarakat menuju Kabupaten Pulau Taliabu yang lebih sejahtera, tangguh, dan inklusif.

4.1.6. Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar

Berdasarkan hasil analisis, **prioritas intervensi pada bidang infrastruktur dasar belum dapat ditetapkan secara komprehensif** karena keterbatasan ketersediaan data indikator yang memadai. Beberapa indikator utama yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar, seperti akses air minum layak, sanitasi layak, dan akses listrik, belum tersedia secara lengkap dan konsisten pada tingkat Kabupaten Pulau Taliabu. Kondisi ini menyebabkan analisis mengenai posisi relatif, perkembangan antarwaktu, efektivitas program, serta keterkaitan infrastruktur dasar dengan penanggulangan kemiskinan belum dapat dilakukan secara objektif.

Keterbatasan data tersebut juga berdampak pada belum tersusunnya analisis determinan yang dapat mengidentifikasi akar permasalahan infrastruktur dasar sebagai dasar penetapan prioritas intervensi. Akibatnya, pemerintah daerah belum memiliki dasar empiris yang kuat untuk merumuskan program dan kegiatan yang paling efektif dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dasar.



Oleh karena itu, **prioritas utama pada tahap ini adalah penguatan sistem data dan informasi infrastruktur dasar**, melalui peningkatan kualitas pendataan, integrasi data lintas perangkat daerah, serta penyediaan data yang lengkap, mutakhir, dan terpilah hingga tingkat desa. Dengan tersedianya data yang valid dan berkelanjutan, pemerintah daerah akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan, menentukan prioritas intervensi, serta mengevaluasi efektivitas program pembangunan infrastruktur dasar dalam mendukung pengurangan kemiskinan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

4.2. Analisis Kondisi Fiskal

Kemampuan fiskal daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Kapasitas fiskal yang memadai memungkinkan pemerintah daerah menyediakan anggaran yang cukup untuk membiayai program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, keterbatasan fiskal akan memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas intervensi penanggulangan kemiskinan.

Kondisi fiskal Kabupaten Pulau Taliabu masih menunjukkan **ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat**, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah. Struktur pendapatan daerah yang didominasi oleh dana transfer mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah masih terbatas dalam membiayai program pembangunan secara mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan fleksibilitas pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan, termasuk program percepatan penanggulangan kemiskinan, menjadi relatif terbatas dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat.

Dari sisi belanja daerah, sebagian besar anggaran masih dialokasikan untuk **belanja operasional**, khususnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Meskipun belanja tersebut diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, proporsi yang cukup besar menyebabkan ruang fiskal untuk meningkatkan belanja yang secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti belanja modal, pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur dasar, menjadi relatif terbatas.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya **peningkatan kualitas belanja daerah (quality of spending)** melalui pengalokasian anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Efektivitas belanja pemerintah perlu diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.

Selain itu, penguatan kapasitas fiskal daerah perlu dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta mendorong investasi yang mampu memperluas basis ekonomi daerah. Di sisi lain, sinergi pendanaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR), filantropi, dan perguruan tinggi perlu terus diperkuat untuk memperluas sumber pembiayaan program penanggulangan kemiskinan.

Dengan demikian, strategi pengelolaan fiskal daerah tidak hanya diarahkan pada peningkatan kapasitas pendapatan, tetapi juga pada **peningkatan efisiensi, efektivitas, pemerataan, dan akuntabilitas belanja daerah**. Melalui kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kemiskinan, diharapkan setiap alokasi anggaran mampu memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan, serta mempercepat pencapaian target penurunan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu secara berkelanjutan.



4.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan seluruh hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah memiliki peran yang sangat strategis sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan. Besarnya kapasitas pendapatan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar, memperluas perlindungan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)**, pendapatan daerah terdiri atas **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, **Pendapatan Transfer**, dan **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**. Selanjutnya, pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah sendiri, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Selain PAD, sumber pendapatan terbesar pemerintah daerah berasal dari **Pendapatan Transfer** yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Pendapatan transfer bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah, mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, pendapatan transfer masih menjadi sumber utama pembiayaan daerah, sehingga kapasitas fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan transfer pemerintah pusat.

Dalam perspektif penanggulangan kemiskinan, struktur pendapatan daerah memiliki implikasi yang sangat penting terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran bagi program-program prioritas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pendapatan daerah perlu terus diupayakan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengembangan potensi ekonomi lokal, peningkatan investasi, serta penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kapasitas pendapatan yang semakin kuat, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, belanja daerah memiliki fungsi strategis sebagai sarana untuk membiayai berbagai program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah** serta **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019**



tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan **Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019**, belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. **Belanja Operasi**, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. **Belanja Modal**, yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran.
3. **Belanja Tidak Terduga**, yang dialokasikan untuk keadaan darurat, bencana, atau kebutuhan mendesak lainnya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. **Belanja Transfer**, yang meliputi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif penanggulangan kemiskinan, kualitas belanja daerah menjadi aspek yang lebih penting dibandingkan besarnya alokasi anggaran semata. Belanja daerah perlu diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui penyediaan pelayanan dasar yang berkualitas, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penguatan perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, efektivitas belanja daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan **penganggaran yang berbasis kinerja (performance-based budgeting)**, **penganggaran yang berorientasi pada hasil (result-based budgeting)**, serta penguatan sinergi antar perangkat daerah. Optimalisasi alokasi belanja pada sektor-sektor prioritas diharapkan mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, sehingga setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.

Selain itu, efisiensi belanja operasional perlu terus ditingkatkan agar tersedia ruang fiskal (*fiscal space*) yang lebih besar untuk meningkatkan belanja pembangunan yang bersifat produktif. Peningkatan proporsi belanja yang mendukung pembangunan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial akan memperkuat efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kebijakan belanja daerah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

4.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran dalam satu tahun anggaran. Berbeda dengan pendapatan daerah yang merupakan hak pemerintah daerah dan belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah, pembiayaan daerah merupakan transaksi yang akan diterima kembali atau dibayarkan kembali pada periode anggaran berikutnya. Oleh karena itu, pembiayaan daerah berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan.



Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah** dan **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**, pembiayaan daerah terdiri atas **Penerimaan Pembiayaan** dan **Pengeluaran Pembiayaan**. Penerimaan pembiayaan antara lain bersumber dari **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya**, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, serta penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

Dalam perspektif penanggulangan kemiskinan, pembiayaan daerah memiliki fungsi strategis sebagai sumber pendanaan alternatif untuk menjaga kesinambungan program-program prioritas ketika pendapatan daerah belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja pembangunan. Pemanfaatan SiLPA secara terencana, misalnya, dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program yang bersifat strategis, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur dasar yang secara langsung mendukung percepatan penurunan kemiskinan.

Pengelolaan pembiayaan daerah harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal (*fiscal prudence*), keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*), serta efisiensi penggunaan sumber daya keuangan daerah. Kebijakan pembiayaan tidak hanya diarahkan untuk menutup defisit anggaran, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, pengelolaan pembiayaan daerah perlu difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan SiLPA secara produktif, peningkatan efektivitas penyertaan modal daerah yang memberikan manfaat ekonomi, serta penguatan perencanaan fiskal agar setiap sumber pembiayaan dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Di sisi lain, penggunaan pinjaman daerah perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan diarahkan hanya untuk membiayai kegiatan produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

Dengan demikian, kebijakan pembiayaan daerah harus menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui pengelolaan pembiayaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah dapat memperkuat kapasitas fiskal, menjaga stabilitas APBD, serta memastikan keberlanjutan pembiayaan program-program penanggulangan kemiskinan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan.



Tabel Kondisi APBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023–2025

KOMPONEN APBD	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
 PENDAPATAN DAERAH	664.755.228.322	639.844.193.599	633.870.104.753
 BELANJA DAERAH	662.159.357.258	625.295.965.948	633.870.104.753
 PEMBIAYAAN DAERAH (NETTO)	(5.745.918.405)	(14.375.000.000)	0

Sumber: APBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2023–2025

Sumber: APBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023-2025

Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2023–2025 menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih relatif terbatas. Dari sisi belanja, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, meskipun ruang fiskal yang tersedia untuk memperluas program pembangunan masih terbatas.

Selama periode tersebut, pendapatan dan belanja daerah menunjukkan kecenderungan mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika kebijakan fiskal nasional dan kondisi perekonomian daerah. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu tetap menjaga keseimbangan APBD sehingga program-program prioritas pembangunan, termasuk program penanggulangan kemiskinan, tetap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

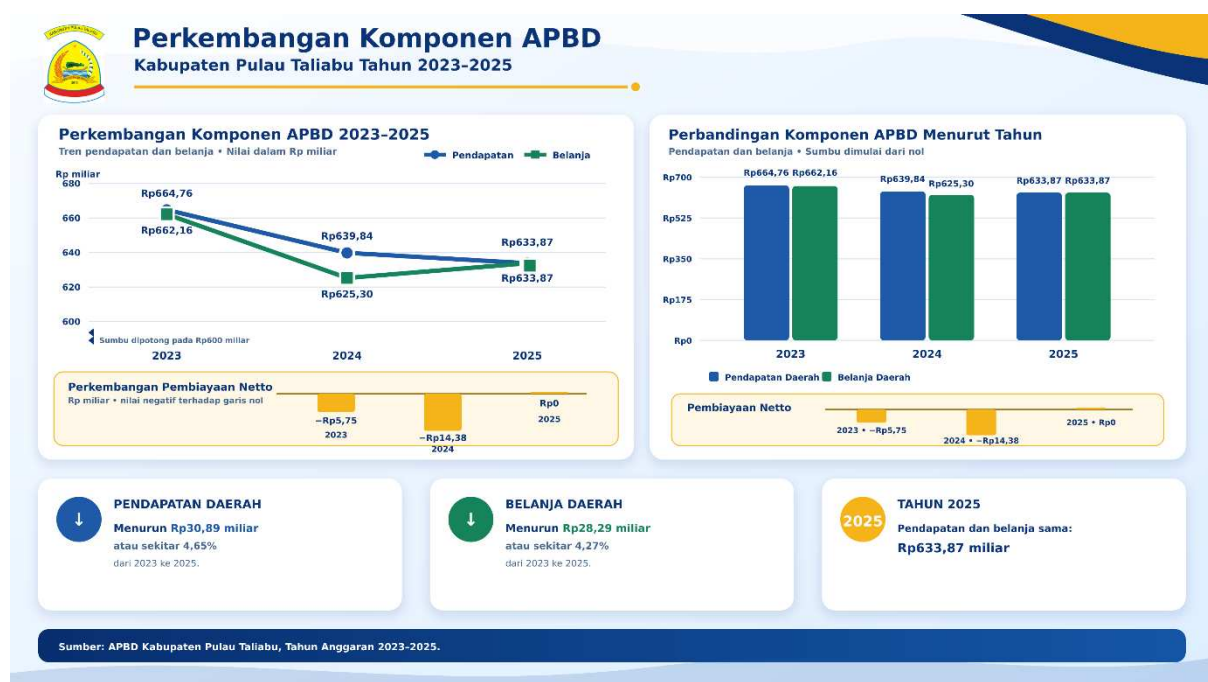
Dalam perspektif pengentasan kemiskinan, tantangan utama bukan hanya terletak pada besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga pada **kualitas pengalokasian belanja daerah**. Oleh karena itu, kebijakan fiskal daerah perlu semakin diarahkan pada pendekatan **pro-poor budgeting**, yaitu penganggaran yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu terus memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, serta penguatan sinergi pendanaan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan pengelolaan APBD yang semakin berkualitas, efektif, dan akuntabel, diharapkan setiap alokasi anggaran mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pencapaian target penurunan kemiskinan secara inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Sebagai bagian dari upaya memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan daerah, perkembangan komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2023–2025 perlu disajikan secara ringkas dan informatif. Visualisasi berikut memperlihatkan perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Netto, sekaligus membandingkan nilai setiap komponen pada masing-masing tahun anggaran.

Penyajian dalam bentuk grafik diharapkan memudahkan pembaca dalam mengenali arah perubahan, kesenjangan antara pendapatan dan belanja, serta posisi pembiayaan netto selama tiga tahun terakhir. Secara umum, pendapatan dan belanja daerah menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun 2023, kemudian tercatat pada nilai yang sama pada tahun 2025, yaitu sebesar Rp633,87 miliar. Sementara itu, pembiayaan netto berada pada posisi negatif pada 2023 dan 2024, lalu menjadi Rp0 pada 2025.

Gambaran tersebut menjadi dasar awal untuk menilai dinamika kapasitas fiskal, keseimbangan anggaran, dan pengelolaan pembiayaan daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Selengkapnya, perkembangan dan perbandingan komponen APBD tahun 2023–2025 disajikan pada grafik berikut.



Sumber: APBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023–2025

Selama periode **2023–2025**, struktur belanja APBD Kabupaten Pulau Taliabu terdiri atas **Belanja Pegawai**, **Belanja Barang dan Jasa**, **Belanja Modal**, serta **Belanja Lainnya** yang meliputi **Belanja Transfer** dan **Belanja Tidak Terduga**. Masing-masing komponen memiliki fungsi yang berbeda dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Belanja Pegawai dialokasikan untuk memenuhi hak aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. **Belanja Barang dan Jasa** digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. **Belanja Modal** diarahkan untuk pembangunan aset dan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sarana pelayanan publik lainnya. Sementara itu, **Belanja Lainnya**, yang terdiri atas Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga, berfungsi mendukung pemerataan

pembangunan, penguatan kapasitas pemerintahan desa, serta penanganan kondisi darurat atau kebutuhan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Dalam perspektif penanggulangan kemiskinan, komposisi belanja daerah menjadi indikator penting dalam menilai keberpihakan kebijakan fiskal terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan. Semakin besar proporsi belanja yang dialokasikan untuk pembangunan sumber daya manusia, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar, semakin besar pula potensi APBD dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Oleh karena itu, analisis struktur belanja daerah Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2023–2025 diperlukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan penganggaran telah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap proporsi **Belanja Pegawai**, **Belanja Barang dan Jasa**, **Belanja Modal**, serta **Belanja Lainnya** juga menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Tabel Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023–2025

APBD	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
 Belanja Pegawai	286.486.795.195	278.417.895.913	280.458.821.254
 Belanja Barang/Jasa	207.891.152.063	176.720.540.035	131.704.232.575
 Belanja Modal	115.793.645.000	142.577.180.000	27.318.353.923
 Belanja Lainnya (Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga)	52.987.765.000	27.580.349.999	3.158.697.001
 Jumlah Belanja Daerah	662.159.357.258	625.295.965.948	633.870.104.753

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2023–2025

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023–2025

Proporsi belanja daerah Kabupaten Pulau Taliabu selama periode **2023–2025** menunjukkan bahwa **Belanja Pegawai** masih menjadi komponen terbesar dalam struktur APBD, dengan proporsi berkisar **43–45 persen** dari total belanja daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran masih digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di sisi lain, proporsi **Belanja Barang dan Jasa** menunjukkan kecenderungan menurun, demikian pula **Belanja Modal** yang mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2025. Sementara itu, **Belanja Lainnya**, yang terdiri atas Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga, memiliki proporsi yang relatif kecil terhadap total belanja daerah.

Komposisi belanja tersebut menunjukkan bahwa ke depan diperlukan penguatan kualitas belanja daerah melalui peningkatan alokasi anggaran yang lebih produktif, khususnya pada **belanja modal, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat**. Dengan komposisi belanja yang semakin berpihak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (*pro-poor budgeting*), diharapkan efektivitas APBD dalam mendukung percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu dapat semakin optimal.

Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023–2025



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2023–2025

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023-2025

4.3. Kemandirian Fiskal

Kemandirian Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan mengandalkan **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Sebaliknya, apabila sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer, maka tingkat kemandirian fiskal daerah masih tergolong rendah.

Dalam konteks pembangunan daerah, kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, memperluas ruang fiskal untuk membiayai program-program strategis, serta mengurangi ketergantungan terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian fiskal menjadi salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**, penguatan kemandirian fiskal daerah dilakukan

melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah.

Tabel Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023–2025

APBD	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
 Pendapatan Daerah	664.755.228.322	639.844.193.599	633.870.104.753
 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.361.961.215	6.201.075.478	6.288.058.753
 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	658.393.267.107	633.643.118.121	627.582.046.000
 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0

Sumber: APBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2023–2025; diolah

Sumber: APBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023–2025

Grafik **Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023–2025** menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih **didominasi oleh Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)** dengan kontribusi sekitar **99%** terhadap total pendapatan daerah setiap tahunnya. Sementara itu, kontribusi **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** masih berada pada kisaran **0,96–0,99%**, sedangkan **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** tidak memberikan kontribusi selama periode tersebut.

Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023–2025

Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023–2025 (dalam persen)



Sumber: APBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2023–2025; diolah

Sumber: APBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023-2025

4.4. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran atau banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang mendukung atau menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor pendorong (*driving factors*) dan faktor penghambat (*inhibiting factors*) menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai dasar untuk merumuskan strategi, kebijakan, dan program yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Faktor pendorong merupakan berbagai potensi, sumber daya, kebijakan, maupun kondisi yang dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan, seperti komitmen pemerintah daerah, dukungan kebijakan nasional, potensi sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Sebaliknya, faktor penghambat adalah berbagai kendala yang dapat memperlambat pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan, antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah, kondisi geografis kepulauan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat, serta belum optimalnya integrasi data dan koordinasi lintas sektor.

Identifikasi faktor pendorong dan penghambat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis kondisi sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kesetaraan gender, kesejahteraan sosial, serta kondisi fiskal daerah. Hasil analisis ini diharapkan menjadi dasar dalam menentukan prioritas kebijakan, memperkuat sinergi lintas sektor, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta meminimalkan berbagai hambatan yang berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, strategi yang dirumuskan akan lebih adaptif terhadap karakteristik Kabupaten Pulau Taliabu dan mampu mendukung pencapaian target penurunan kemiskinan secara inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

1. Bidang Kemiskinan Konsumsi

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

Adanya program perlindungan sosial, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, serta komitmen pemerintah dalam penurunan kemiskinan. Tren Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun.

Faktor Penghambat

Tingkat pendapatan masyarakat miskin masih rendah, kesenjangan pengeluaran terhadap Garis Kemiskinan masih tinggi, produktivitas ekonomi masyarakat belum optimal, serta ketergantungan terhadap bantuan sosial masih cukup besar.



PERLINDUNGAN SOSIAL
Bantuan yang tepat sasaran menjaga daya tahan keluarga.



EKONOMI MASYARAKAT
Pemberdayaan meningkatkan pendapatan dan kemandirian.



INFRASTRUKTUR DASAR
Akses layanan dasar memperkuat kualitas hidup masyarakat.



TREN KEMISKINAN
P0, P1, dan P2 cenderung menurun secara bertahap.

“

Penurunan kemiskinan yang berkelanjutan membutuhkan perlindungan yang tepat sasaran dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan konsumsi

2. Bidang Pendidikan

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

Meningkatnya APK, APM, HLS, dan RLS menunjukkan adanya perbaikan akses pendidikan. Dukungan Program Wajib Belajar, BOS, Program Indonesia Pintar (PIP), serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menjadi modal utama peningkatan kualitas SDM.

Faktor Penghambat

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih rendah, APM SMP/MTs masih di bawah rata-rata provinsi, angka putus sekolah masih terjadi terutama pada jenjang menengah, serta keterbatasan akses pendidikan di wilayah kepulauan dan terpencil.



AKSES PENDIDIKAN
APK, APM, HLS, dan RLS menunjukkan perbaikan akses.



DUKUNGAN PROGRAM
Wajib Belajar, BOS, dan PIP memperluas kesempatan belajar.



SARANA PRASARANA
Fasilitas pendidikan mendukung proses belajar yang berkualitas.



KUALITAS SDM
Pendidikan menjadi fondasi pembangunan manusia.

“

Akses pendidikan yang merata adalah fondasi peningkatan kualitas SDM dan masa depan masyarakat di wilayah kepulauan.

Arah kebijakan peningkatan kualitas pendidikan

3. Bidang Kesehatan

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

Komitmen pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, penguatan Posyandu, peningkatan cakupan JKN, serta meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH).

Faktor Penghambat

Prevalensi stunting masih di atas target nasional, kasus malaria masih tinggi, AKI dan AKB masih menjadi tantangan, serta keterbatasan tenaga kesehatan dan akses pelayanan kesehatan di wilayah terpencil.



PENURUNAN STUNTING

Intervensi terpadu memperkuat tumbuh kembang anak.



LAYANAN DASAR

Pelayanan primer menjadi fondasi kesehatan masyarakat.



POSYANDU & JKN

Cakupan layanan memperluas perlindungan kesehatan.



HARAPAN HIDUP

AHH mencerminkan perbaikan derajat kesehatan masyarakat.

“

Layanan kesehatan yang mudah dijangkau adalah fondasi masyarakat yang sehat, produktif, dan tangguh.

Arah kebijakan peningkatan derajat kesehatan



4. Bidang Ketenagakerjaan

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

Potensi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM cukup besar, serta adanya program pelatihan kerja, padat karya, dan pengembangan kewirausahaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) relatif rendah.

Faktor Penghambat

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih rendah, kesempatan kerja formal terbatas, kompetensi tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja, serta investasi yang menciptakan lapangan kerja masih terbatas.



SEKTOR UNGGULAN

Pertanian dan perikanan menopang kesempatan kerja.



PELATIHAN KERJA

Keterampilan yang relevan meningkatkan daya saing.



UMKM & WIRUSAHA

Usaha lokal memperluas sumber pendapatan masyarakat.



TPT RELATIF RENDAH

Pengangguran terbuka tetap perlu dikendalikan.

“

Lapangan kerja yang produktif tumbuh dari keterampilan yang relevan, usaha lokal yang kuat, dan investasi yang inklusif.

Arah kebijakan perluasan kesempatan kerja



5. Bidang Sosial

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

Meningkatnya kualitas pendataan kelompok rentan, tersedianya program rehabilitasi sosial, bantuan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial, dan penguatan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Faktor Penghambat

Sistem pendataan kelompok rentan belum sepenuhnya terintegrasi, akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan fasilitas publik masih terbatas, serta pemberdayaan ekonomi kelompok rentan belum optimal.



DATA KELOMPOK RENTAN

Data yang berkualitas mendukung layanan tepat sasaran.



REHABILITASI SOSIAL

Pemulihan fungsi sosial memperkuat kemandirian.



BANTUAN SOSIAL

Dukungan sosial menjaga ketahanan kelompok rentan.



PERLINDUNGAN INKLUSIF

Akses yang setara memperkuat martabat setiap warga.

“

Perlindungan sosial yang inklusif memastikan setiap warga memperoleh akses, kesempatan, dan martabat yang setara.

Arah kebijakan perlindungan sosial inklusif



6. Bidang Kesetaraan Gender

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG), adanya kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan, serta berkembangnya pemberdayaan ekonomi perempuan.

Faktor Penghambat

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih rendah, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) masih tinggi, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan dunia kerja masih terbatas, serta akses terhadap sumber daya ekonomi belum setara.



PEMBANGUNAN GENDER

Peningkatan IPG mencerminkan kemajuan pembangunan.



PUG

Perspektif gender memperkuat kualitas kebijakan publik.



AKSES LAYANAN

Pendidikan dan kesehatan harus dapat diakses setara.



EKONOMI PEREMPUAN

Pemberdayaan memperluas akses terhadap sumber daya.

“

Kesetaraan gender membuka ruang yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berkontribusi, memimpin, dan berkembang.

Arah kebijakan pembangunan gender yang setara



7. Bidang Infrastruktur Dasar

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

Adanya komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pendanaan pemerintah pusat, serta pembangunan jalan, sanitasi, air minum, listrik, dan telekomunikasi yang terus dilakukan.

Faktor Penghambat

Ketersediaan data indikator infrastruktur dasar masih terbatas sehingga analisis belum dapat dilakukan secara komprehensif. Selain itu, kondisi geografis kepulauan menyebabkan pemerataan pelayanan infrastruktur menjadi lebih sulit, sementara masih terdapat keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar di beberapa wilayah terpencil.



KONEKTIVITAS JALAN

Jalan memperlancar mobilitas orang dan barang.



AIR & SANITASI

Air minum dan sanitasi meningkatkan kualitas hidup.



KELISTRIKAN

Energi mendukung layanan dan kegiatan ekonomi.



TELEKOMUNIKASI

Jaringan digital menghubungkan wilayah kepulauan.

“

Infrastruktur dasar yang merata memperpendek jarak pelayanan dan membuka peluang pembangunan bagi seluruh wilayah.

Arah kebijakan pemerataan infrastruktur dasar



Secara umum, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki sejumlah **faktor pendorong** yang cukup kuat dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, antara lain komitmen pemerintah daerah, dukungan kebijakan nasional, potensi sumber daya alam, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta berkembangnya berbagai program pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa **faktor penghambat** yang memerlukan perhatian, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya kesempatan kerja produktif, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, keterbatasan akses pelayanan dasar pada wilayah kepulauan, belum optimalnya pemberdayaan kelompok rentan dan perempuan, serta keterbatasan data pada beberapa indikator pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor, penguatan tata kelola, dan optimalisasi sumber daya daerah agar faktor-faktor pendorong dapat dimanfaatkan secara maksimal sekaligus meminimalkan berbagai hambatan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

4.5. Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Strategi dan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu disusun berdasarkan hasil analisis kondisi kemiskinan, identifikasi determinan penyebab kemiskinan, kemampuan fiskal daerah, serta faktor-faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Pendekatan yang digunakan menempatkan kemiskinan sebagai permasalahan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan sosial, kesetaraan gender, serta ketersediaan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.

Penyusunan strategi dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Aksi Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan. Strategi tersebut juga mempertimbangkan karakteristik wilayah Kabupaten Pulau Taliabu sebagai daerah kepulauan, sehingga setiap intervensi dirancang agar sesuai dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil analisis determinan, program penanggulangan kemiskinan diarahkan pada upaya mengatasi akar permasalahan (*root causes*) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja,



peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, serta penguatan tata kelola penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan intervensi yang hanya berfokus pada penanganan dampak kemiskinan.

Implementasi strategi dilakukan melalui pendekatan **konvergensi program**, yaitu mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program lintas perangkat daerah, pemerintah desa, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya, mengurangi tumpang tindih program, memperkuat ketepatan sasaran, serta mempercepat pencapaian target penurunan kemiskinan secara inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, strategi dan program yang dirumuskan dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu tidak hanya diarahkan untuk menurunkan persentase penduduk miskin, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, serta mewujudkan pembangunan daerah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.

Berikut **Tabel Strategi Penurunan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu** yang disusun berdasarkan hasil analisis determinan kemiskinan, RPJMN 2025–2029, Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, serta kondisi daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

No.	Strategi	Tujuan	Arah Kebijakan/Program Utama
1	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan kelompok rentan.	Perlindungan sosial, bantuan pangan, bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, bantuan perumahan, bantuan listrik dan air bersih, serta perlindungan kelompok rentan.
2	Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin	Meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin melalui kegiatan ekonomi produktif.	Pengembangan UMKM, bantuan modal usaha, pengembangan koperasi, hilirisasi produk lokal, pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, dan ekonomi kreatif.
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat sebagai modal pembangunan.	Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan vokasi, beasiswa, serta pencegahan putus sekolah.
4	Perluasan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.	Pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, program padat karya, penempatan tenaga kerja, kewirausahaan, dan pengembangan investasi daerah.
5	Pembangunan Infrastruktur Dasar	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan mendukung aktivitas ekonomi.	Pembangunan jalan, jembatan, air minum layak, sanitasi, listrik, telekomunikasi, transportasi antarwilayah, dan infrastruktur desa.
6	Pemberdayaan Kelompok Rentan	Meningkatkan kesejahteraan kelompok	Pemberdayaan penyandang disabilitas, perempuan kepala

		rentan agar mampu mandiri secara sosial dan ekonomi.	keluarga, lansia, anak terlantar, masyarakat adat, bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan bantuan usaha produktif.
7	Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi.	Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan ekonomi perempuan, pelatihan kewirausahaan, peningkatan kepemimpinan perempuan, perlindungan perempuan dan anak.
8	Penguatan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan sinergi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.	Penguatan TKPKD, integrasi data kemiskinan (DTSEN/Satu Data), monitoring dan evaluasi, digitalisasi data, kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
9	Penguatan Kapasitas Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan	Meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.	Optimalisasi PAD, peningkatan kualitas belanja daerah (<i>pro-poor budgeting</i>), penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha (CSR/TJSL), dan perguruan tinggi.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu disusun sebagai salah satu instrumen implementasi pembangunan daerah yang selaras dengan visi Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu **"Mewujudkan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Kabupaten MUDA (Mandiri, Unggul, Damai, Adaptif) yang Maju di Provinsi Maluku Utara."** Visi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi, memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul, hidup dalam kondisi yang aman dan harmonis, serta mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan tantangan pembangunan.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan visi tersebut. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan sosial, serta infrastruktur dasar. Oleh karena itu, upaya penurunan kemiskinan perlu dilakukan secara terpadu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian masyarakat, pemerataan pembangunan wilayah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keterkaitan antara visi **MUDA** dengan penanggulangan kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Mandiri**, diwujudkan melalui peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat dengan memperkuat sektor unggulan daerah, mengembangkan UMKM, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta mendorong tumbuhnya wirausaha baru sehingga masyarakat mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan.
- **Unggul**, diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, serta penguasaan teknologi sehingga masyarakat memiliki daya saing yang lebih tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

- **Damai**, diwujudkan melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan memperhatikan kelompok rentan sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan tanpa adanya kesenjangan sosial yang tinggi.
- **Adaptif**, diwujudkan melalui penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan ekonomi, sosial, teknologi, maupun perubahan iklim, sehingga masyarakat memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap berbagai risiko yang dapat menyebabkan atau memperparah kemiskinan.

Pelaksanaan RAD Penanggulangan Kemiskinan juga mendukung pencapaian misi pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu, terutama misi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan pelayanan publik. Melalui pelaksanaan program-program yang terintegrasi lintas sektor, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan sosial, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan daya saing daerah.

Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan bukan hanya menjadi salah satu program pembangunan, tetapi merupakan **strategi fundamental** untuk mewujudkan Kabupaten Pulau Taliabu yang **Mandiri, Unggul, Damai, dan Adaptif**, di mana setiap warga memperoleh kesempatan yang setara untuk meningkatkan kualitas hidup, berpartisipasi dalam pembangunan, dan menikmati hasil pembangunan secara adil dan berkelanjutan.

Keterkaitan Visi MUDA dengan Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Pulau Taliabu · Kerangka Transformasi Pembangunan 2025–2029





BAB V

LOKASI PRIORITAS

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**





BAB V. LOKASI PRIORITAS

5.1. Penentuan Lokasi Kecamatan

Dalam rangka menentukan lokasi prioritas program penanggulangan kemiskinan, idealnya dilakukan melalui analisis berbasis data mikro Regsosek (SEPAKAT) dengan melakukan overlay antara jumlah penduduk miskin Desil 1 dan 2 dengan jumlah kepala keluarga perempuan tidak bekerja pada Desil 1 dan 2. Namun, karena keterbatasan ketersediaan data tersebut pada tingkat kabupaten, maka penentuan lokasi prioritas dilakukan menggunakan pendekatan **analisis indikatif berbasis karakteristik wilayah**.

Pendekatan ini mempertimbangkan beberapa faktor yang memiliki keterkaitan kuat dengan tingkat kerentanan kemiskinan, yaitu konsentrasi penduduk miskin, keterbatasan akses pelayanan dasar, kondisi geografis wilayah kepulauan, keterbatasan kesempatan kerja, tingkat ketergantungan terhadap sektor primer, serta kelompok masyarakat rentan seperti rumah tangga perempuan tidak bekerja.

Hasil identifikasi indikatif menunjukkan bahwa wilayah dengan karakteristik keterbatasan akses, jumlah penduduk relatif besar, serta ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap sektor informal dan sumber daya alam menjadi wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, lokasi prioritas yang ditetapkan bersifat **indikatif** dan perlu dilakukan pemutakhiran apabila data Regsosek/SEPAKAT telah tersedia.

Penentuan Lokasi Prioritas ini harus diposisikan sebagai **justifikasi awal yang bersifat indikatif**. Penetapan akhir sebaiknya divalidasi menggunakan data berikut:

- 1) Jumlah dan kepadatan penduduk;
- 2) Angka kemiskinan dan kerentanan sosial;
- 3) Akses jalan dan transportasi laut;
- 4) Waktu tempuh menuju pusat pelayanan;
- 5) Kondisi pendidikan dan kesehatan;
- 6) Akses air minum, sanitasi, listrik, dan internet;
- 7) Kondisi ketenagakerjaan dan potensi ekonomi;
- 8) Tingkat keterisolasian desa;
- 9) Risiko bencana; serta
- 10) Kemampuan fiskal dan ketersediaan program pembangunan.

Dengan demikian, kategori prioritas tidak dimaknai sebagai penilaian bahwa suatu kecamatan “lebih penting”, melainkan sebagai urutan kebutuhan intervensi berdasarkan tingkat urgensi, luas manfaat, dan kesenjangan pelayanan yang teridentifikasi secara awal.

5.1.1. Bidang Kemiskinan Konsumsi

Berikut tabel penentuan lokasi prioritas bidang **kemiskinan konsumsi**. Alasan disusun menggunakan pendekatan indikatif berbasis karakteristik wilayah—meliputi aksesibilitas, keterjangkauan pelayanan dasar, biaya distribusi, ketahanan pangan, struktur mata pencaharian, konsentrasi penduduk, dan potensi ekonomi lokal.



No.	Kecamatan	Kategori Prioritas	Alasan Penetapan Prioritas secara Indikatif	Intervensi Program yang Direkomendasikan
1	Taliabu Barat	Prioritas I — Sangat Prioritas	Merupakan pusat pemerintahan dan permukiman dengan konsentrasi penduduk serta rumah tangga rentan yang relatif besar. Tekanan kebutuhan konsumsi, biaya perumahan, dan ketergantungan pada pasar cukup tinggi. Pertumbuhan kawasan perkotaan juga berpotensi menimbulkan kantong kemiskinan yang membutuhkan penanganan terpadu.	Pemutakhiran data rumah tangga miskin; bantuan pangan tepat sasaran; stabilisasi harga dan pasar murah; rehabilitasi rumah tidak layak huni; penyediaan air minum dan sanitasi; pelatihan kerja; penguatan UMKM rumah tangga miskin; serta pendampingan graduasi bansos.
2	Taliabu Utara	Prioritas I — Sangat Prioritas	Wilayahnya luas dengan permukiman yang tersebar, sehingga jangkauan pelayanan dan distribusi kebutuhan pokok lebih sulit. Jarak antardesa dan biaya transportasi berpotensi meningkatkan harga pangan serta membatasi akses rumah tangga miskin terhadap kesehatan, pendidikan, dan pasar.	Pelayanan sosial bergerak; bantuan pangan untuk desa sulit dijangkau; subsidi atau dukungan distribusi bahan pokok; kebun pangan keluarga; pengembangan pertanian dan perkebunan; pengolahan hasil melalui BUMDes; padat karya konektivitas desa; serta perluasan layanan dasar.
3	Taliabu Selatan	Prioritas II — Prioritas Tinggi	Mempunyai potensi pertanian dan perkebunan, tetapi nilai tambah dan akses pasar diperkirakan belum optimal. Pendapatan rumah tangga cenderung bergantung pada produksi primer dan dapat berfluktuasi menurut musim, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.	Diversifikasi pangan lokal; bantuan sarana produksi; pengembangan perkebunan rakyat; pengolahan dan pemasaran hasil; akses permodalan disertai pendampingan; padat karya infrastruktur desa; pencegahan stunting; serta peningkatan air minum dan sanitasi.
4	Taliabu Timur Selatan	Prioritas II — Prioritas Tinggi	Karakter pesisir memunculkan ketergantungan terhadap transportasi laut dan pasokan dari luar wilayah. Biaya	Penguatan distribusi pangan; pasar murah berkala; dukungan transportasi bahan pokok; bantuan sarana perikanan; pengolahan

			logistik, keterbatasan akses pelayanan dasar, dan mata pencaharian yang dipengaruhi musim dapat meningkatkan kerentanan konsumsi rumah tangga.	hasil laut; padat karya infrastruktur pesisir; layanan kesehatan dan sosial bergerak; rehabilitasi rumah; serta penyediaan sanitasi.
5	Taliabu Barat Laut	Prioritas III — Prioritas Sedang	Permukiman pesisir dan kepulauan kecil menghadapi kendala konektivitas, tetapi skala penduduk dan tekanan kebutuhannya diperkirakan lebih terbatas dibandingkan wilayah prioritas I dan II. Potensi perikanan dan perkebunan dapat menjadi modal penguatan pendapatan masyarakat.	Penguatan ketahanan pangan pesisir; bantuan alat usaha perikanan skala rumah tangga; pengolahan ikan; kebun pangan keluarga; layanan sosial keliling; dukungan transportasi lokal; serta perbaikan air minum dan sanitasi pada kantong kemiskinan.
6	Lede	Prioritas III — Prioritas Sedang	Kedekatan relatif terhadap pusat kegiatan memberikan peluang akses pasar dan pelayanan, tetapi rumah tangga berpendapatan rendah masih dapat menghadapi keterbatasan modal, keterampilan, kualitas permukiman, dan kesempatan kerja produktif.	Penguatan usaha mikro dan pedagang kecil; modal usaha berbasis pendampingan; pelatihan keterampilan bagi pemuda dan keluarga miskin; fasilitasi pemasaran produk; bantuan pangan sementara; perbaikan permukiman, air minum, dan sanitasi; serta sistem rujukan layanan sosial.
7	Taliabu Timur	Prioritas III — Prioritas Sedang	Memiliki potensi perikanan, perkebunan, dan perdagangan pesisir yang dapat menopang konsumsi masyarakat. Namun, biaya angkutan, keterbatasan fasilitas pengolahan, dan akses pasar dapat menekan pendapatan serta daya beli sebagian rumah tangga.	Pengembangan rantai nilai perikanan dan perkebunan; bantuan sarana produksi; fasilitas penyimpanan dan pengolahan; kemitraan pemasaran; pelatihan kewirausahaan; padat karya peningkatan konektivitas; bantuan pangan pada wilayah berharga tinggi; dan penguatan pelayanan dasar.
8	Tabona	Prioritas IV — Prioritas Rendah	Skala wilayah dan penduduk relatif lebih kecil sehingga kebutuhan intervensi agregat diperkirakan lebih terbatas. Namun, keterpencilan dan hambatan akses tetap	Verifikasi rumah tangga miskin secara individual; bantuan pangan bagi kelompok termiskin; kebun pangan dan perbaikan gizi keluarga; usaha mikro berbasis potensi lokal; rehabilitasi



	dapat menimbulkan rumah tangga miskin yang memerlukan penanganan khusus dan tepat sasaran.	rumah dan sanitasi secara selektif; serta pemantauan graduasi penerima bantuan.
--	--	---

Arah intervensi berdasarkan tingkat prioritas

- 1) **Prioritas I:** Melaksanakan intervensi terpadu dan intensif untuk mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Penanganan perlu dilakukan lintas sektor, berbasis keluarga, dan menjangkau kantong kemiskinan hingga tingkat desa..
- 2) **Prioritas II:** Mempercepat penguatan pendapatan, ketahanan pangan, dan pelayanan dasar. Intervensi diarahkan kepada rumah tangga rentan yang berisiko jatuh atau kembali berada dalam kemiskinan.
- 3) **Prioritas III:** Melaksanakan intervensi terarah pada desa, kantong kemiskinan, dan kelompok rentan tertentu. Program menitikberatkan pada penguatan potensi ekonomi lokal dan pencegahan munculnya kemiskinan baru.
- 4) **Prioritas IV:** Mempertahankan capaian, meningkatkan mutu pelayanan, serta menangani rumah tangga miskin secara individual dan selektif. Fokus diarahkan pada pencegahan kerentanan dan keberlanjutan graduasi dari bantuan sosial.

Penentuan lokasi prioritas penanganan kemiskinan konsumsi diperlukan agar pelaksanaan program dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan karakteristik setiap wilayah. Penetapan prioritas kecamatan dilakukan melalui pendekatan analisis indikatif yang mempertimbangkan kondisi geografis, aksesibilitas, keterjangkauan pelayanan dasar, biaya distribusi kebutuhan pokok, ketahanan pangan, struktur mata pencaharian, konsentrasi penduduk, serta potensi ekonomi lokal.

Berdasarkan pendekatan tersebut, kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu dikelompokkan ke dalam empat tingkat prioritas. Prioritas I merupakan wilayah yang memerlukan intervensi terpadu dan intensif; Prioritas II membutuhkan percepatan penguatan pendapatan, ketahanan pangan, dan pelayanan dasar; Prioritas III diarahkan pada penanganan kantong-kantong kemiskinan dan pengembangan potensi ekonomi lokal; sedangkan Prioritas IV memerlukan intervensi yang lebih selektif bagi rumah tangga miskin dan rentan.

Peta berikut menyajikan persebaran tingkat prioritas penanganan kemiskinan konsumsi pada delapan kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Pemetaan ini diharapkan menjadi rujukan awal dalam menentukan lokasi, intensitas, dan bentuk intervensi program, serta perlu divalidasi lebih lanjut menggunakan data kemiskinan tingkat kecamatan, desa, dan rumah tangga.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, **SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu)** berbasis **Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)/Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)**; Badan Pusat Statistik (BPS); Badan Informasi Geospasial (BIG); serta data Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, diolah

5.1.2. Bidang Pendidikan

Berikut tabel prioritas bidang pendidikan yang dikembangkan melalui **analisis indikatif berbasis karakteristik wilayah**. Pertimbangannya meliputi luas dan persebaran permukiman, aksesibilitas antardesa, kondisi kepulauan, jarak menuju sekolah, ketersediaan guru, keberlanjutan pendidikan antarjenjang, sarana pembelajaran, serta peran kecamatan sebagai pusat pelayanan.

No.	Kecamatan	Kategori Prioritas	Alasan Penetapan Prioritas secara Indikatif	Intervensi Program yang Direkomendasikan
1	Taliabu Utara	Prioritas I— Sangat Prioritas	Wilayah yang luas dan pola permukiman yang tersebar berpotensi menyebabkan jarak sekolah relatif jauh serta pelayanan pendidikan sulit menjangkau seluruh desa. Distribusi guru, pengawasan sekolah, transportasi pelajar, dan keberlanjutan pendidikan antarjenjang diperkirakan menjadi tantangan utama.	Pembangunan atau revitalisasi sekolah berdasarkan pemetaan kebutuhan; penyediaan kelas jauh atau sekolah satu atap; transportasi dan asrama pelajar; afirmasi serta rumah dinas guru; pemerataan guru mata pelajaran; internet sekolah; beasiswa siswa rentan; dan pencegahan putus sekolah.
2	Taliabu Timur	Prioritas I— Sangat Prioritas	Sebaran permukiman pesisir dan ketergantungan terhadap transportasi antarlokasi dapat	Penguatan SMP dan SMA/SMK yang mudah dijangkau; transportasi pelajar; beasiswa dan bantuan perlengkapan



			membatasi akses pendidikan. Jarak menuju sekolah jenjang menengah, keterbatasan guru mata pelajaran, sarana digital, serta biaya perjalanan berpotensi menghambat partisipasi dan keberlanjutan sekolah.	sekolah; penempatan guru berbasis kebutuhan; pembelajaran digital luring dan daring; laboratorium bergerak; serta pengembangan pendidikan vokasi perikanan, perkebunan, dan ekonomi pesisir.
3	Taliabu Timur Selatan	Prioritas I— Sangat Prioritas	Kondisi pesisir, jarak antardesa, dan keterbatasan konektivitas dapat meningkatkan waktu serta biaya perjalanan menuju sekolah. Risiko ketidakhadiran dan putus sekolah diperkirakan lebih tinggi apabila jenjang pendidikan lanjutan tidak tersedia di sekitar tempat tinggal siswa.	Sekolah satu atap atau layanan kelas jauh; perahu/angkutan sekolah yang memenuhi standar keselamatan; asrama pelajar; tambahan ruang kelas; insentif guru wilayah sulit; dukungan transisi SD–SMP dan SMP–SMA; beasiswa; serta sistem penelusuran anak tidak sekolah.
4	Taliabu Selatan	Prioritas II— Prioritas Tinggi	Permukiman yang tersebar dan akses menuju pusat layanan pendidikan belum tentu merata. Potensi hambatan terdapat pada ketersediaan guru, kualitas fasilitas, kelanjutan pendidikan ke jenjang menengah, dan kemampuan keluarga membiayai kebutuhan tidak langsung pendidikan.	Rehabilitasi ruang kelas dan sanitasi sekolah; pemerataan guru; penguatan literasi dan numerasi; transportasi pelajar untuk desa jauh; beasiswa siswa miskin; pendampingan transisi antarjenjang; perpustakaan dan internet sekolah; serta pendidikan kecakapan hidup berbasis potensi pertanian dan perkebunan.
5	Lede	Prioritas II— Prioritas Tinggi	Kedekatan relatif dengan pusat kegiatan dapat memberikan akses yang lebih baik, tetapi pertumbuhan kebutuhan layanan, kepadatan kelas tertentu, kesiapan sarana, dan keberadaan siswa dari keluarga rentan tetap memerlukan perhatian. Lede juga berpotensi melayani wilayah penyangga di sekitarnya.	Peningkatan kapasitas dan mutu sekolah; rehabilitasi ruang belajar; penguatan guru mata pelajaran; beasiswa dan perlengkapan siswa rentan; pusat sumber belajar; internet dan perangkat digital; bimbingan belajar; layanan pendidikan inklusif; serta pelatihan vokasi dan kewirausahaan bagi remaja.

6	Taliabu Barat Laut	Prioritas III— Prioritas Sedang	Skala penduduk dan kebutuhan layanan diperkirakan lebih terbatas dibandingkan wilayah prioritas I dan II. Namun, karakter pesisir dan kepulauan tetap dapat menimbulkan hambatan transportasi, distribusi guru, akses buku, serta sarana pembelajaran.	Pemeliharaan dan rehabilitasi sekolah; dukungan transportasi pelajar secara selektif; guru kunjung; peningkatan kompetensi guru; perpustakaan keliling; perangkat pembelajaran digital luring; beasiswa terarah; serta pemantauan kehadiran dan anak tidak sekolah.
7	Tabona	Prioritas III— Prioritas Sedang	Jumlah penduduk dan skala layanan diperkirakan relatif lebih kecil, tetapi keterpencilan dapat membatasi pilihan sekolah dan mata pelajaran. Tantangan utama berpotensi berupa keberlanjutan layanan, kekurangan guru tertentu, dan akses menuju pendidikan menengah.	Penguatan sekolah yang sudah ada; kelas multijenjang sesuai ketentuan; guru kunjung dan insentif penugasan; transportasi atau asrama pelajar; pembelajaran digital luring; bantuan siswa miskin; serta kerja sama layanan pendidikan dengan kecamatan terdekat.
8	Taliabu Barat	Prioritas IV— Prioritas Rendah	Sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan kabupaten, wilayah ini secara indikatif memiliki akses sekolah, tenaga pendidik, transportasi, dan sarana pendukung yang relatif lebih baik. Meskipun demikian, kantong kerentanan, tekanan kapasitas sekolah, dan ketimpangan mutu antarsekolah tetap perlu ditangani.	Peningkatan mutu pembelajaran; pemerataan siswa dan guru antarsekolah; pendidikan inklusif; bantuan bagi siswa dari keluarga miskin; pencegahan putus sekolah; peningkatan laboratorium dan teknologi pendidikan; penguatan SMK sesuai kebutuhan pasar kerja; serta pemantauan kantong kerentanan perkotaan.

Arah kebijakan menurut tingkat prioritas

- 1) **Prioritas I:** perluasan akses dan intervensi intensif, terutama penyediaan layanan di wilayah sulit, transportasi atau asrama pelajar, pemerataan guru, dan pencegahan putus sekolah.
- 2) **Prioritas II:** peningkatan kapasitas, kualitas, dan kesinambungan pendidikan antarjenjang serta dukungan afirmatif bagi siswa rentan.
- 3) **Prioritas III:** penguatan layanan yang telah tersedia melalui intervensi terarah pada desa sulit dijangkau, kekurangan guru tertentu, dan siswa berisiko.
- 4) **Prioritas IV:** pemeliharaan capaian, peningkatan mutu, pengurangan ketimpangan antarsekolah, dan penanganan selektif terhadap kantong kerentanan.

Penentuan lokasi prioritas penanganan kemiskinan dalam bidang pendidikan diperlukan untuk memastikan pemerataan akses, peningkatan mutu, dan keberlanjutan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Penetapan prioritas dilakukan melalui pendekatan analisis indikatif berbasis karakteristik wilayah dengan mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan, persebaran permukiman, aksesibilitas antardesa, jarak menuju sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, kelengkapan sarana pembelajaran, serta keberlanjutan pendidikan antarjenjang.

Berdasarkan pendekatan tersebut, setiap kecamatan dikelompokkan ke dalam empat tingkat prioritas. Prioritas I memerlukan perluasan akses dan intervensi pendidikan secara intensif; Prioritas II diarahkan pada peningkatan kapasitas dan mutu pelayanan; Prioritas III berfokus pada penguatan layanan di wilayah yang masih menghadapi kendala tertentu; sedangkan Prioritas IV diarahkan pada pemeliharaan capaian, peningkatan kualitas, dan penanganan kantong kerentanan secara selektif.

Peta berikut menggambarkan persebaran tingkat prioritas penanganan kemiskinan bidang pendidikan pada delapan kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Pemetaan ini diharapkan menjadi rujukan awal dalam menentukan lokasi, intensitas, dan bentuk intervensi pendidikan agar program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran serta responsif terhadap kebutuhan setiap wilayah.

Klasifikasi tersebut masih bersifat indikatif dan perlu divalidasi lebih lanjut menggunakan data pendidikan tingkat kecamatan dan desa, antara lain angka partisipasi sekolah, anak tidak sekolah, angka putus sekolah, ketersediaan dan kondisi satuan pendidikan, distribusi guru, jarak tempuh, serta aksesibilitas pelayanan pendidikan.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, **SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu)** berbasis **Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)/Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)**; Badan Pusat Statistik (BPS); Badan Informasi Geospasial (BIG); serta data Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, diolah

5.1.3. Bidang Kesehatan

Berikut tabel prioritas **penanganan kemiskinan bidang kesehatan** berdasarkan pendekatan analisis indikatif berbasis karakteristik wilayah. Pertimbangannya meliputi aksesibilitas fasilitas kesehatan,



persebaran permukiman, kondisi kepulauan, ketersediaan tenaga kesehatan, sistem rujukan, biaya transportasi pasien, kesehatan ibu dan anak, penyakit menular, gizi, serta akses air minum dan sanitasi.

No.	Kecamatan	Kategori Prioritas	Alasan Penetapan Prioritas secara Indikatif	Intervensi Program yang Direkomendasikan
1	Taliabu Timur	Prioritas I— Sangat Prioritas	Sebaran permukiman pesisir dan jarak menuju pusat pelayanan berpotensi membatasi akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Ketergantungan pada transportasi darat atau laut dapat meningkatkan waktu serta biaya perjalanan pasien. Ketersediaan tenaga kesehatan, obat, dan sarana pelayanan juga perlu mendapat perhatian.	Penguatan puskesmas dan pustu; pelayanan kesehatan bergerak; penempatan dokter, bidan, dan tenaga gizi; rumah dinas tenaga kesehatan; ambulans darat atau laut; peningkatan kepesertaan aktif JKN; penguatan kesehatan ibu dan anak; pengendalian malaria dan penyakit menular; serta perbaikan air minum dan sanitasi.
2	Taliabu Timur Selatan	Prioritas I— Sangat Prioritas	Karakter pesisir, jarak antardesa, dan keterbatasan konektivitas berpotensi menghambat pelayanan kesehatan rutin maupun kegawatdaruratan. Rujukan ibu hamil, bayi, balita, dan pasien penyakit berat dapat menghadapi keterlambatan apabila transportasi serta komunikasi belum memadai.	Puskesmas keliling dan layanan laut; ambulans laut; rumah tunggu kelahiran; penguatan pelayanan persalinan; Posyandu aktif; kunjungan rumah bagi keluarga rentan; tambahan bidan dan tenaga gizi; telemedisin; pengendalian malaria; serta penyediaan sanitasi dan air minum aman.
3	Taliabu Utara	Prioritas I— Sangat Prioritas	Wilayah yang luas dengan permukiman tersebar berpotensi menimbulkan ketimpangan jangkauan pelayanan kesehatan. Jarak menuju fasilitas, distribusi tenaga dan obat, serta pengawasan kesehatan masyarakat menjadi lebih sulit. Kondisi tersebut dapat meningkatkan beban biaya kesehatan tidak langsung bagi rumah tangga miskin.	Penambahan atau revitalisasi pustu berdasarkan kebutuhan; tenaga kesehatan berbasis wilayah; puskesmas keliling; penyediaan obat dan alat diagnostik dasar; kendaraan operasional; penguatan Posyandu; layanan ibu dan anak; intervensi gizi dan stunting; JKN aktif; pengendalian penyakit menular; serta sistem rujukan antardesa.

4	Taliabu Selatan	Prioritas II— Prioritas Tinggi	Persebaran permukiman dan akses menuju fasilitas kesehatan diperkirakan belum merata. Rumah tangga miskin masih berpotensi menghadapi hambatan biaya perjalanan, keterbatasan pemeriksaan rutin, masalah gizi, serta akses air minum dan sanitasi yang belum memadai.	Penguatan puskesmas dan jaringan pustu; pemerataan bidan dan perawat; revitalisasi Posyandu; pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal; pencegahan stunting; pelayanan kesehatan reproduksi; bantuan kepesertaan JKN; penyediaan air minum dan sanitasi; serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.
5	Lede	Prioritas II— Prioritas Tinggi	Akses terhadap pusat pelayanan relatif lebih baik dibandingkan wilayah yang lebih terpencil, tetapi pertumbuhan kebutuhan layanan dan keberadaan rumah tangga rentan dapat meningkatkan beban fasilitas kesehatan. Kapasitas pelayanan, ketersediaan tenaga, kualitas lingkungan permukiman, dan perlindungan biaya kesehatan tetap perlu diperkuat.	Peningkatan kapasitas puskesmas; penambahan tenaga sesuai kebutuhan; penguatan pelayanan laboratorium dan farmasi; skrining penyakit tidak menular; pelayanan ibu dan anak; Posyandu terpadu; perluasan JKN bagi keluarga miskin; perbaikan sanitasi permukiman; serta sistem rujukan yang lebih cepat.
6	Tabona	Prioritas III— Prioritas Sedang	Skala penduduk dan kebutuhan pelayanan diperkirakan relatif lebih kecil, tetapi keterpencilan dapat membatasi pilihan fasilitas serta ketersediaan tenaga kesehatan tertentu. Intervensi diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan dan mencegah rumah tangga rentan mengalami beban biaya kesehatan yang tinggi.	Penguatan fasilitas kesehatan yang tersedia; tenaga kesehatan kunjung; layanan kesehatan bergerak berkala; stok obat esensial; transportasi rujukan; Posyandu; pemantauan ibu hamil dan balita; aktivasi JKN; pemeriksaan penyakit menular; serta intervensi air minum dan sanitasi secara selektif.
7	Taliabu Barat Laut	Prioritas III— Prioritas Sedang	Kondisi pesisir dan keberadaan permukiman yang berjauhan dapat memengaruhi akses terhadap pelayanan	Puskesmas atau pelayanan keliling pesisir; dukungan transportasi pasien; pemerataan bidan dan perawat; penguatan Posyandu; intervensi gizi

			kesehatan. Namun, skala kebutuhan agregat diperkirakan lebih terbatas dibandingkan wilayah prioritas I dan II. Tantangan utama berpotensi berkaitan dengan transportasi, tenaga kesehatan, gizi, dan kesehatan lingkungan.	keluarga; pengendalian malaria dan penyakit berbasis lingkungan; JKN bagi keluarga miskin; serta penyediaan air minum dan sanitasi pada desa rentan.
8	Taliabu Barat	Prioritas IV— Prioritas Rendah	Sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan kabupaten, Taliabu Barat secara indikatif memiliki akses fasilitas kesehatan, tenaga medis, transportasi, dan sistem rujukan yang relatif lebih baik. Meskipun demikian, kantong kemiskinan perkotaan, kepadatan pelayanan, dan ketimpangan akses antarpermukiman tetap perlu ditangani.	Peningkatan mutu dan kapasitas layanan rujukan; penanganan kantong kemiskinan secara terarah; JKN aktif bagi keluarga miskin; skrining penyakit tidak menular; penguatan kesehatan ibu dan anak; sanitasi kawasan padat; surveilans penyakit; serta peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan pasien.

Arah intervensi berdasarkan tingkat prioritas

- 1) **Prioritas I:** perluasan jangkauan pelayanan secara intensif, pemerataan tenaga kesehatan, penguatan sistem rujukan, transportasi pasien, JKN, pelayanan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular.
- 2) **Prioritas II:** peningkatan kapasitas dan mutu fasilitas, penguatan Posyandu, intervensi gizi, kesehatan lingkungan, dan perlindungan pembiayaan kesehatan.
- 3) **Prioritas III:** pemeliharaan dan penguatan layanan secara terarah, terutama pelayanan bergerak, tenaga kunjung, ketersediaan obat, dan rujukan bagi desa sulit dijangkau.
- 4) **Prioritas IV:** peningkatan kualitas pelayanan, pengendalian beban fasilitas, dan penanganan selektif terhadap kantong kemiskinan serta kelompok rentan.

Penentuan lokasi prioritas penanganan kemiskinan bidang kesehatan diperlukan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata, khususnya rumah tangga miskin dan kelompok rentan. Penetapan prioritas dilakukan melalui pendekatan analisis indikatif berbasis karakteristik wilayah dengan mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan, persebaran permukiman, akses menuju fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, sistem rujukan, biaya transportasi pasien, kondisi kesehatan ibu dan anak, permasalahan gizi, penyakit menular, serta akses air minum dan sanitasi.

Berdasarkan pendekatan tersebut, setiap kecamatan dikelompokkan ke dalam empat tingkat prioritas. Prioritas I memerlukan perluasan jangkauan pelayanan dan intervensi kesehatan secara intensif; Prioritas II diarahkan pada peningkatan kapasitas fasilitas, penguatan pelayanan gizi dan kesehatan lingkungan; Prioritas III berfokus pada penguatan pelayanan bergerak dan sistem rujukan di wilayah

yang sulit dijangkau; sedangkan Prioritas IV diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan serta penanganan selektif terhadap kantong kemiskinan dan kelompok rentan.

Peta berikut menggambarkan persebaran tingkat prioritas penanganan kemiskinan bidang kesehatan pada delapan kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Pemetaan ini diharapkan menjadi rujukan awal dalam menentukan lokasi, intensitas, dan bentuk intervensi kesehatan agar program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran, responsif terhadap kondisi wilayah, dan mampu mengurangi beban pengeluaran kesehatan rumah tangga miskin.

Klasifikasi tersebut masih bersifat indikatif dan perlu divalidasi lebih lanjut menggunakan data kesehatan tingkat kecamatan dan desa, seperti prevalensi stunting dan malaria, kesehatan ibu dan bayi, cakupan imunisasi, kepesertaan aktif JKN, ketersediaan tenaga kesehatan, jarak menuju fasilitas, serta akses air minum dan sanitasi.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, **SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu)** berbasis **Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)/Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN)**; Badan Pusat Statistik (BPS); Badan Informasi Geospasial (BIG); serta data Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, diolah

5.1.4. Bidang Ketenagakerjaan

Berikut tabel prioritas **penanganan kemiskinan bidang ketenagakerjaan** berdasarkan analisis indikatif berbasis karakteristik wilayah. Pertimbangannya meliputi struktur mata pencaharian, ketergantungan pada sektor primer, akses pasar, konektivitas, peluang kerja formal, keterampilan tenaga kerja, pengolahan komoditas, perkembangan UMKM, dan kedekatan dengan pusat kegiatan ekonomi.

No.	Kecamatan	Kategori Prioritas	Alasan Penetapan Prioritas secara Indikatif	Intervensi Program yang Direkomendasikan
1	Taliabu Timur	Prioritas I—Sangat Prioritas	Perekonomian wilayah secara indikatif	Pelatihan berbasis kompetensi; pengolahan

			bergantung pada perikanan, perkebunan, dan kegiatan primer yang dipengaruhi musim. Keterbatasan pengolahan hasil, akses pasar, modal, serta kesempatan kerja formal dapat menyebabkan produktivitas dan pendapatan pekerja tetap rendah. Jarak ke pusat ekonomi juga berpotensi meningkatkan biaya usaha.	hasil perikanan dan perkebunan; bantuan peralatan usaha; inkubasi UMKM; sertifikasi keterampilan; kemitraan pemasaran; padat karya produktif; layanan informasi kerja; serta pengembangan wirausaha muda dan perempuan.
2	Taliabu Timur Selatan	Prioritas I— Sangat Prioritas	Karakter pesisir dan keterbatasan konektivitas dapat mempersempit pilihan pekerjaan di luar sektor primer. Mata pencaharian yang bergantung pada hasil laut dan musim berpotensi menimbulkan ketidakstabilan pendapatan. Akses pelatihan, modal, teknologi, dan pasar juga diperkirakan masih terbatas.	Pelatihan perikanan dan keterampilan maritim; pengolahan serta penyimpanan hasil laut; bantuan alat produksi; koperasi pekerja atau nelayan; padat karya infrastruktur pesisir; pelatihan usaha mikro; dukungan pemasaran digital; perlindungan pekerja rentan; dan diversifikasi pekerjaan pada musim paceklik.
3	Taliabu Selatan	Prioritas I— Sangat Prioritas	Potensi pertanian dan perkebunan cukup besar, tetapi sebagian pekerjaan diperkirakan masih bersifat informal, berproduktivitas rendah, dan belum menghasilkan nilai tambah optimal. Terbatasnya pengolahan komoditas, akses pembiayaan, keterampilan, dan jaringan pemasaran dapat menahan peningkatan pendapatan tenaga kerja.	Pelatihan pertanian dan perkebunan modern; unit pengolahan komoditas; hilirisasi produk lokal; penguatan kelompok usaha; akses pembiayaan disertai pendampingan; padat karya produktif; pelatihan kewirausahaan; kemitraan pembelian hasil; serta perlindungan sosial ketenagakerjaan.
4	Taliabu Utara	Prioritas II— Prioritas Tinggi	Wilayah yang luas dan permukiman tersebar dapat membatasi akses pencari kerja terhadap pelatihan, informasi pasar kerja, permodalan, dan pusat	Pelatihan kerja keliling; pengembangan sentra pertanian dan perkebunan; mekanisasi tepat guna; pengolahan hasil; BUMDes produktif; dukungan logistik dan



			pemasaran. Sektor pertanian serta perkebunan berpotensi menyerap tenaga kerja, tetapi membutuhkan peningkatan produktivitas dan konektivitas.	pemasaran; pelatihan pengelolaan usaha; program pemagangan; padat karya konektivitas; serta pendataan pencari kerja.
5	Lede	Prioritas II— Prioritas Tinggi	Kedekatan relatif dengan pusat kegiatan membuka peluang perdagangan dan jasa, tetapi kapasitas UMKM, keterampilan pemuda, akses modal, dan penyerapan tenaga kerja formal masih perlu diperkuat. Peralihan tenaga kerja dari sektor primer ke pekerjaan yang lebih produktif membutuhkan dukungan khusus.	Pusat pelatihan kerja dan kewirausahaan; penguatan UMKM perdagangan dan jasa; akses modal berbasis pendampingan; pelatihan digital dan administrasi usaha; sertifikasi keterampilan; bursa kerja; program pemagangan; pendampingan usaha perempuan; serta fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha.
6	Taliabu Barat Laut	Prioritas III— Prioritas Sedang	Skala penduduk dan pasar tenaga kerja diperkirakan lebih kecil dibandingkan wilayah prioritas I dan II. Meskipun demikian, karakter pesisir serta keterbatasan konektivitas dapat membatasi diversifikasi usaha dan pemasaran hasil perikanan atau perkebunan.	Pelatihan keterampilan berbasis potensi pesisir; bantuan alat usaha; pengolahan ikan dan hasil kebun; kelompok usaha bersama; pemasaran kolektif; pelatihan perawatan mesin dan transportasi laut; padat karya selektif; serta perlindungan pekerja informal.
7	Tabona	Prioritas III— Prioritas Sedang	Jumlah penduduk dan skala kegiatan ekonomi diperkirakan relatif terbatas. Peluang kerja dapat terkonsentrasi pada beberapa komoditas atau pekerjaan primer, sehingga peningkatan keterampilan dan diversifikasi usaha tetap diperlukan untuk mencegah kerentanan pendapatan.	Pelatihan kerja keliling; pengembangan usaha mikro rumah tangga; diversifikasi usaha berbasis komoditas lokal; bantuan alat produksi; pemasaran bersama; padat karya desa; pelatihan keterampilan bagi pemuda; dan fasilitasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
8	Taliabu Barat	Prioritas IV— Prioritas Rendah	Sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi kabupaten, wilayah ini secara indikatif memiliki pasar kerja,	Bursa dan informasi pasar kerja; pelatihan sesuai kebutuhan dunia usaha; pemagangan; sertifikasi kompetensi; inkubasi UMKM; penguatan



perdagangan, jasa, transportasi, dan akses pelatihan yang relatif lebih berkembang. Namun, pengangguran pemuda, pekerja informal, dan kantong rumah tangga berpendapatan rendah tetap memerlukan intervensi selektif.

ekonomi kreatif dan jasa; penempatan kerja; perlindungan pekerja informal; serta intervensi khusus bagi pemuda yang tidak bekerja atau tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Arah intervensi berdasarkan tingkat prioritas

- 1) **Prioritas I:** penciptaan kesempatan kerja secara intensif, peningkatan keterampilan, hilirisasi komoditas, penguatan UMKM, padat karya produktif, dan perlindungan pekerja rentan.
- 2) **Prioritas II:** peningkatan produktivitas sektor unggulan, perluasan akses pelatihan, pengembangan kewirausahaan, dan penguatan konektivitas dengan pasar.
- 3) **Prioritas III:** intervensi terarah pada diversifikasi mata pencaharian, usaha mikro, keterampilan pemuda, dan pengolahan komoditas lokal.
- 4) **Prioritas IV:** peningkatan kualitas serta kecocokan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, disertai penanganan selektif terhadap pengangguran dan pekerja informal.

Penentuan lokasi prioritas penanganan kemiskinan bidang ketenagakerjaan diperlukan untuk mengarahkan program penciptaan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi secara lebih tepat sasaran. Penetapan prioritas dilakukan melalui pendekatan analisis indikatif berbasis karakteristik wilayah dengan mempertimbangkan struktur mata pencaharian, ketergantungan pada sektor primer, produktivitas tenaga kerja, akses pasar, konektivitas, kesempatan kerja formal, perkembangan UMKM, dan potensi komoditas unggulan setiap kecamatan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu dikelompokkan ke dalam empat tingkat prioritas. Prioritas I memerlukan intervensi intensif berupa penciptaan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, hilirisasi komoditas, dan penguatan UMKM. Prioritas II diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor unggulan, perluasan pelatihan, serta penguatan kewirausahaan dan konektivitas pasar. Prioritas III berfokus pada diversifikasi mata pencaharian dan pengembangan usaha lokal, sedangkan Prioritas IV diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja serta penanganan pengangguran dan pekerja informal secara selektif.

Peta berikut menggambarkan persebaran tingkat prioritas penanganan kemiskinan bidang ketenagakerjaan pada delapan kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Pemetaan ini diharapkan menjadi rujukan awal dalam menentukan lokasi, intensitas, dan bentuk intervensi agar pembangunan ketenagakerjaan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat pendapatan rumah tangga.

Klasifikasi tersebut masih bersifat indikatif dan perlu divalidasi menggunakan data ketenagakerjaan tingkat kecamatan dan desa, antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, proporsi pekerja informal, pendapatan tenaga kerja, pengangguran pemuda, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta potensi usaha dan kebutuhan keterampilan setiap wilayah.